Tarbiyah ʿilī al albāb: Ideologi Pembaharuan Kepemimpinan Perguruan Tinggi
Moh. Padi = 7 – 30

Penilaian School Investment Plan untuk Efektivitas Pengelolaan Sekolah
Agung Nugroho = 31 – 48

Internalisasi Religious Culture Melalui Manajemen Pembiasaan Diri
di SMKN I Klungkung Bali
Widyanti Hardiyaningrum = 49 – 70

Kontruksi Kebijakan Manajemen Mutu Sekolah Bertaraf Internasional
M. Najib = 71 – 84

Aktualisasi Principles of Corporate Management dan Budaya Perubahan
Perspektif Kiai Pondok Pesantren
Mardiyah = 85 – 108

Varian Interaksionisme Simbolik Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Sidogiri
Sugeng Haryanto = 109 – 136

Issued by:
Department of Islamic Education Management
Postgraduate Program
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Indonesia
Editorial Address:

Department of Islamic Education Management,
Postgraduate Program
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Indonesia
Gajayana Street 12 Malang 65144 Telp. 0341-551354, Fax. 0341-572533
E-mail: jurnalmpi_ppsuinmalang@yahoo.com
Penanggung Jawab
Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang

Redaktur Ahli / Mitra Bestari
Prof. Dr. H. Muhamin (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Prof. Dr. H. Dade Rosyada, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadhol, M.Pd (Universitas Negeri Malang)
Prof. Dr. Nanang Fatah, M.Pd (UPI Bandung)
Prof. Dr. H. Tobroni, M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang)
Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Ian M. Robothom (Associate Dean (International) Faculty of Art and Education: Deakin University)
Prof. Dr. Sunita Sing Sengupta (Delhi University)
Prof. Saud Alam (Aligarh Moslem University of India)
Prof. Akhtarul Wasey (Jami’ah Mutliia Islamiyah India)

Pemimpin Redaksi
Dr. H. M. Mujab, MA

Sekretaris Redaksi
Dr. Hj. Sutiah. M.Pd

Dewan Redaksi
Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd
Dr. H. Samsul Hady, M.Ag
Dr. H. Zaenuddin, MA
Dr. H. Sugeng Listiyo Prabowo, M.Pd
Slamet, SE., MM., Ph.D

Sekretariat
Dr. H. A. Fatah Yasin, M.Ag
Drs. Agus Sucipto, MM
Angga Teguh Prastyo, M.Pd
Iqbal Kuncoroningrat, S.Psi

Daftar Isi

Kolom Redaksi

Kepemimpinan Integratif Menjua Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam - 1 - 6

Tarbiyah alī al albāb: Ideologi Pembaharuan Kepemimpinan Perguruan Tinggi
Muh. Pudlīl = 7 - 30

Perilisan School Investment Plan untuk Efektivitas Pengelolaan Sekolah
Agyung Nugroho = 31 - 48

Internalisasi Religious Culture Melalui Manajemen Pembiasaan Diri
di SMKN I Klungkung Bali
Widyanti Herdianingrum = 49 - 70

Kontraksi Kebijakan Manajemen Mutu Sekolah Bertaraf Internasional
M. Mujah = 71 - 84

Aktualisasi Principles of Corporate Management dan Budaya Perubahan
Perspektif Kiai Pondok Pesantren
Merdiah = 85 - 108

Varian Interaksionisme Simbolik Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Sidogiri
Suweng Haryanto = 109 - 136

Kapabilitas Kepemimpinan Kepala SMP Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah
sebagai Motivator Guru
Rahmah = 137 - 156

Diversifikasi In Service Training untuk Pengendalian Mutu Pendidik
Muhamad Hadi = 157 - 174

Pemodelan Middle Range Theory dalam Analisis Fungsional Kepemimpinan Kiai Sholeh
Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural
di Universitas Yudharta Pasuruan
Sulahah = 175 - 204

Studi Hermeneutika Akar-Akar Kekerasan dalam Dunia Pendidikan
Zulfi Mubarak = 205 - 296
Kontruksi Kebijakan Manajemen Mutu Sekolah Bertaraf Internasional

M Mujab
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

The idea policy of international school establishment appears when the education quality in Indonesia looks so low in competitiveness. Therefore, the government designs programs and policies for increasing the education quality in Indonesia. The appearing of International School is expected to encourage the quality and competitiveness of education institution in Indonesia. Not only that, it is also hoped to anticipate the increasing of international labor migration and to keep job vacancy for Indonesian labor in national job market that organized by foreign companies in Indonesia. Thereby, one of International school establishment ideas is to anticipate the work rivalry in national even international level.

Keywords: policy, international school, competitiveness

Abstrak


Kata kunci: kebijakan, sekolah bertaraf internasional, keunggulan

A. Revitalisasi Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemajuan bangsa. Ini berarti semakin berkualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sebuah bang-
sa, maka akan semakin baik pula kualitas bangsa tersebut. Sebagaimana diketahui pada era global ini, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didukung oleh sumberdaya manusia (SDM). Kesemuanya dapat ditunjuk dengan adanya pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, penataan sistem kelembagaan serta peningkatan kesejahteraan yang memadai. Oleh karenanya, mencetak SDM yang berkualitas dan tenaga kependidikan merupakan kebutuhan mendesak. Itu semua tidak bisa diabaikan. Sebab, sesungguhnya faktor-faktor tersebut menempati posisi sentral dalam mengejawantahkan dan melahirkan sistem pendidikan berkualitas di negeri ini.

Pendidik menjadi unsur dasar pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan itu sendiri, terutama bagi penciptaan SDM yang unggul. Disini lah peran manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan dihadirkan. Dengan begitu, manajemen pendidikan sesungguhnya dilakukan untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keprabadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara”.

Sejauh ini, belum pernah digelar seminar atau workshop di lingkungan perguruan tinggi agama Islam seperti UIN, IAIN, STAIN dan perguruan tinggi lain tentang pembahasan sisitem pendidikan yang komprehensif. Selain itu, juga belum pernah ada konsensus atau kesepakatan bersama mengenai pentingnya kerjasama atau networking antar pengembangan sistem pendidikan yang komprehensif dalam merumuskan epistemologi, arah kebijakan, dan kurikulumnya secara lebih luas dan integratif.

Persoalan yang timbul pada setiap pengembangan sistem pendidikan adalah core of science dan State of the Arts-nya. Sebab, setiap adanya usaha pengembangan sistem pendidikan secara substantial berarti akan terjadi pembidangan wilayah antara agama dan non agama. Proses itu dijalankan tanpa ada tindakan serius dan pada akhirnya terkadang diendapkan tanpa ada penyelesaian. Padahal di negara China perhatian terhadap manajemen pendidikan begitu besar, seperti diungkap berikut ini:

There are a number of reasons why the improvement of educational management and the effective implementation of educational policy in any country should be given high priority. Educational management has an impact on the teaching and learning process, the organizational practices of school units, the utilization of both human and material resources, and the use of efficiency criteria and control systems. Educational poli-
cy provides guidelines for decision making, while the decision-making process itself influences the determination of policy.¹
to the change of teachers’ status. Before the issue of the law, teachers was regarded as state cadres (Guojia Canbu).²

Begitu juga dengan reformasi pendidikan di China, perubahan demi perubahan dalam sistem pendidikan mengandungkans pada model baru yang ditempuh pemerintah dalam sistem rekrutmen tenaga pendidik. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak, antara pihak sekolah sebagai pengusaha dan tenaga pendidik sebagai pihak ke II terjadi kesamaan hak, dan kedua belah pihak memiliki posisi setara.

Perbaikan manajemen pendidikan di China dilakukan dengan mengubah sytem kontrak kerja tenaga pendidik. Perubahan pendidikan terjadi amat luar biasa ketika sistem kontrak tersebut diterapkan.

This law brings some great changes to teachers. First, it means that the relationship between school and teacher has changed to labor employment relationship between employer and employee rather than the previous administration relationship between the subordinate and the superior. School and teacher become “equal” contract relationship. Teachers have the freedom to choose the schools where they like to work, and the freedom to quit from the school they dislike. As for schools, they also have the freedom to hire or fire the staff. Second, the law leads

Kondisi lembaga pendidikan Islam, pun mengalami kesulitan dalam pengembangan budaya organisasi. Namun, menurut Minhad Astoriq dalam Husaini Usman, menyatakan; meskipun belum dilakukan penelitian khusus tentang guru-guru maupun kepala sekolah tetapi ada ketidak konsistenan di dunia pendidikan Indonesia, misalnya; ketika hendak dilakukan penilaian kinerja sekolah, satuan pendidikan tersebut tiba-tiba menjadi serba baik. Apa pun caranya, semua guru harus memiliki perangkat mengajar yang lengkap dan baik. Absen guru harus nihil, Kalau tidak masuk harus ada surat ijin atau surat keterangan sakit. Tidak boleh ada sampah berserakan di sekolah. Adminstrasi dan keuangan sekolah harus tertib dan lancar. Keadaan demikian juga terjadi kalau sekolah yang bersangkutan mau diakreditasi.³ Lebih lanjut menurut Paul Suparno dalam Usman; mengatakan bahwa budaya lembek sudah mempengaruhi dunia pendidikan yang disebabkan oleh faktor yang timbul baik dari dalam peserta didik, sekolah maupun keluarga. Budaya lembek juga dipengaruhi

¹ Anonim, International Journal of Educational Management Vol. 23 No. 6, 2009, pp. 446
³ Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 23
sekolah, karena banyak guru yang tidak be-
ran menuntun secara tegas kepada peserta
didak belajar lebih keras.\footnote{Iusaini Usman, \textit{Manajemen, Teori...}, hlm. 25}

Hingga saat ini sistem pendidikan
dalam tataran implementasi di sekolah
masih dianggap kurang berhasil. Beragam
argumentasi dikemukakan untuk mendu-
kung pendapat tersebut. Paling tidak, ada
tiga argumentasi yang bisa dikemukakan.
\textit{Pertama}, pendidikan kurang bisa mengu-
bah pengetahuan agama yang kognitif
menjadi “nilai” yang mampu mendorong
penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan.
\textit{Kedua}, pendidikan selama ini lebih mene-
kankan pada aspek \textit{knowing} dan \textit{doing}, be-
lum banyak mengarah kepada aspek \textit{being},
yaitu bagaimana menjadikan peserta didik
mampu menjalani hidup sesuai dengan
ajaran dan nilai-nilai agama yang diken-
hui (\textit{knowing}). \textit{Ketiga}, pendidikan kurang
mempunyai relevansi terhadap perubahan
 sosial yang terjadi di masyarakat sehingga
peserta didik kurang menghayati nilai-
ilai agama sebagai nilai yang hidup dalam
keseharian di masyarakat.\footnote{Muhammad, \textit{Rekonstruksi Pendidikan Islam,} (J -
karta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 31}

Terkait dengan problem di atas, seharusnya sasaran pen-
didikan dapat mengantarkan peserta didik
untuk dapat mengembangkan ilmu penge-
tahuan dan teknologi. Ini dilakukan agar
sistem pendidikan yang dijalankan mampu
menghasilkan mutu lulusannya yang mam-
pu bersaing dalam skala global. Pada tahap
kedua pendidikan, mestinya mampu men-
gantarkan kepada peserta didik memasuki
tuntutan dalam masyarakat industri atau
ekonomi. Dimana tuntutannya tidak lagi
cukup dengan keterampilan motorik yang
kaku, melainkan diperlukan kemampuan
untuk melaksanakan pekerjaan seperti \textit{con-
trolling, monitoring, maintaining, designing, organizing}
yang relevan dengan kemau-
juan teknologi. Dengan kata lain, pendidik-
ian harus mampu menyiapkan anggota
masyarakat memasuki dunia kerja yang
menuntut bukan saja keterampilan meka-
nistis, tetapi meliputi kemampuan berko-
munikasi, bekerja sama dengan orang lain
serta mengelola dan mengatasi konflik.

Jika demikian arah dan tujuan-
ya, maka kurikulum yang dirancang
dalam sistem pendidikan, selain harus
mengacu pada perkembangan kebutuhan
masyarakat, juga harus didukung oleh tena-
ga pendidik yang profesional, yaitu tenaga
pendidik yang memiliki kemampuan me-
rcanakan, mengelola, dan mendiagnosis
proses pembelajaran secara tepat. Bahkan
tidak cukup dengan itu, tenaga pendidik
juga dituntut dapat memberikan bimbi-
angan dan kepemimpinan yang didasarkan
atas pemahaman yang baik terhadap peserta
didak. Hal tersebut merupakan muara un-
tuk melahirkan \textit{output} pendidikan berkom-
petensi handal dalam menangani problem-
problem pendidikan Islam secara mikro
maupun makro. Jika dipetakan, problem-problem kependidikan secara umum terdiri dari tiga ranah utama yaitu: (1) fundamental, (2) struktural, (3) operasional.

Pertama, problem fundamental meliputi manajemen pengembangan pendidikan di sekolah, analisis manajemen kebijakan standar kompetensi lulusan sekolah bertaraf internasional, analisis kritis tentang kebijakan standar isi sekolah bertaraf internasional, analisis kritis tentang pembelajaran sekolah bertaraf internasional, analisis kritis kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah bertaraf internasional, analisis kritis kebijakan standar sarana dan prasarana sekolah bertaraf internasional, analisis kebijakan standar pengelolaan pendidikan sekolah bertaraf internasional, manajemen kebijakan tentang komite sekolah bertaraf internasional, manajemen kebijakan Peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah, manajemen pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dan sebagainya.

Kedua, problem struktural. Ditinjau dari struktur demografis dan geografis, sistem pendidikan bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa dan desa terpencil; Dari struktur perkembangan jiwa marusia bisa dikategorikan ke dalam masa anak, remaja, dewasa, dan manula; Dari struktur ekonomi dikategorikan ke dalam kaya, menengah, miskin/fakir; Dari struktur rumah tangga terdapat rumah tangga karir dan non karir; dan dari struktur atau jenjang pendidikan bisa dikategorikan ke dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; dan seterusnya.


Secara umum bisa dikatakan, banyak tantangan dan problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan, mulai dari masalah etika dan moralitas hingga berbagai isu global dan nasional, perlu mendapat perhatian. Isu-isu global, antara lain yang menyangkut revitalisasi pemahaman pendidikan, kompetisi atau daya saing internasional, maupun liberalisasi pendidikan perlu mendapat perhatian serius. Sedangkan isu-isu nasional antara lain menyangkut pendidikan multi-

6 Muhaimin, Rekonstruksi..., hlm. 34
kultural dan civic values (hak asasi manusia, penegakan hukum, demokrasi dan gender), dikotomi pendidikan, pendidikan transformatif, kapitalisasi pendidikan, komitmen APBN bidang pendidikan, dan daya saing nasional juga harusnya ditindaklanjuti. Lebih lanjut, pendidikan Islam sebagai sebuah sistem organisasi yang terdiri atas konteks, input, proses, output dan outcome, menghadapi tantangan yang cukup berat dewasa ini. Contoh yang dapat diambil dalam konteks itu antara lain terdiri dari atas landasan hukum saat ini, kebijakan permerintah yang berlaku, tantutan pengembangan diri dan peluang lulusan, otonomi pendidikan, globalisasi, nilai-nilai harapan masyarakat, dunia usaha dan industri, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, dukungan pemerintah, masyarakat, dan sumberdaya manusianya. Input pendidikan, yang meliputi visi, tujuan, sasaran, program, kurikulum, ketenagaan, peserta didik, sarpras, dana, regulasi, organisasi, administrasi, peran serta masyarakat, dan budaya sekolah harus segera direvitalisasi. Sementara output pendidikan yang meliputi prestasi akademik dan nonakademik harus segera diserahkan dengan tujuan pendidikan nasional. Pada akhirnya kesemuanya mengarah kepada terbentuknya outcome pendidikan yang antara lain tergambarkan dari banyaknya peserta didik yang memiliki kesempatan untuk studi lanjut, bekerja, dan mengembangkan diri.

Secara teoritis, jika sebuah sistem pendidikan mau mengembangkan diri, maka harus dimulai dari memperbaiki outcome-nya. Itu berarti dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dimulai dari pemecahan masalah dan melihat analisis dari konteks-nya. Untuk menghindari pemecahan sepotong-sepotong, maka pendekatan yang dilakukan harus menggunakan pendekatan sistemik. Artinya perubahan harus dengan cara melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang tersistem.7 Untuk mewujudkan cita-cita itu, maka pemerintah melakukan program sekolah bertaraf internasional (SBI) sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) dan atau negara maju lainnya yang dirumuskan dengan NSP + X. Secara definitif sekolah bertaraf Internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Sejak digulirkannya kebijakan tentang pendirian SBI, pemerintah banyak menemui kritik dari berbagai kalangan, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat, praktisi pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat. Kritik-kritik itu pada umumnya menyuarakan ketidak-setujuannya terhadap langkah pemerintah yang dipandang sebagai kebijakan yang “tergesa-

7 Husaini Usman, Manajemen, Teori..., hlm. 56
gesa”. Kritik tersebut berisi tentang kurang bersihh akta pemerintah terhadap pendidikan masyarakat pada lapisan bawah, kritik penggunaan bahasa asing serta kritik atas ketidak kesiapan pihak sekolah dalam mengimplementasikan program-program SBI yang dipandang cukup berat dan rumit terutama bagi sekolah-sekolah di daerah.

Kritik juga dilontarkan karena belum adanya acuan operasional yang jelas tentang dibangunnya faktor X yang dimaksud dalam ketentuan pengembangan kurikulumnya. Ini yang menyebabkan SBI di Indonesia menjadi berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Pada akhirnya, hal tersebut mengakibatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya tidak seragam.


B. Pendidikan Internasional dan Identitas Kebangsaan

Sebagai anggota komunitas global, Indonesia berada dalam pergulatan antar bangsa terutama dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sebagai bangsa besar, kita tidak bisa menghindarkan diri dari pengaruh pergaulan global yang mengharuskan persaingan dengan bangsa-bangsa lain. Untuk mengatasi tantangan di atas, maka diperlukan pendidikan yang berkualitas. Sebab, hal tersebut merupakan indikator mutlak di dalam persaingan internasional. Digulirkannya kebijakan standar nasional pendidikan dan standar internasional tentu hanya dapat dicapai secara bertahap, bukan secara sekuensial. Tetapi yang perlu diingat, peningkatan mutu pendidikan dengan melalukan stadarisasi (bertaraf Internasional) sepaturnya tidak melupakan esensi dari pendidikan itu sendiri. Hal ini dikarenakan yang menjadi masalah utama.
di sini bukanlah persaingan dalam arti the survival of the fittest, tetapi yang merupakan subjek pendidikan sesungguhnya adalah anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harkat anak bangsa Indonesia tidak dapat disubordinasikan dengan tuntutan-tuntutan stadard pendidikan nasional, regional dan internasional. Sebab anak bangsa Indonesia tetap merupakan suatu subjek bernartabat yang perlu dijadikan titik tolak di dalam setiap upaya untuk mencapai dan meningkatkan stadard pendidikan.

Di sisi lain, sesungguhnya fungsi standar dalam pendidikan adalah bertujuan memetakan masalah pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, keberadaan standar seakan-akan telah menjadi milik birokrasi pendidikan sehingga perserta-didik semata-mata menjadi objek dari kekuasaan birokrasi. Oleh karena itu, proses belajar dapat terarah hanya dengan mempersiapkan ujian nasional yang telah ditentukan oleh birokrasi pendidikan dan bukan melalui proses belajar berkesinambungan yang diadakan secara berkala oleh guru. Kelulusan seharusnya bukan hanya bertumpu dan ditentukan semata-mata oleh ujian nasional. Tetapi kelulusan merupakan suatu proses integratif dalam pendidikan yang mempunyai banyak segi.

Penyelenggaraan pendidikan di semua negara menganut berbagai pemikiran. Salah satunya adalah adanya keharusan mengakses pendidikan dasar yang harus diikuti oleh semua warga negara. Keterlaksaan hal itu dapat memberikan arti perwujudan kesetaraan pendidikan yang merata sehingga rakyat Indonesia memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap untuk dapat hidup bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, secara teoritis sebagaimana diungkap oleh M. Levin, dari Standford University bahwa pendidikan seharusnya menyiapkan empat (4) hal bagi peserta didik maupun luas, yakni: (1). Civic competence, (2). Social cultural competence, (3). Economic competence, (4). Cultural competence. Bila hal ini dikaikan dengan Undang-Undang 1945 pasal 31 Ayat (2) yang dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan” lalu diikuti pasal 31 ayat (3) yang mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, maka pengembangan pendidikan di Indonesia seharusnya didasarkan pada asas pemerataan, termasuk dalam mutu pelayanan dan sistem pengelo-laanya.

Bertolak dari uraian di atas maka sesungguhnya: pertama, pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya; Kedua, setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan menengah dan pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan tetapi tidak wajib membiayainya. Akan tetapi di negara-negara lain seperti Swe-

Pada jenjang perguruan tinggi di Amerika, kesemua peserta didik diwajibkan membayar, tetapi untuk pendidikan wajib 12 tahun dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah federal. Pada saat yang bersamaan, pemerintah setempat juga memberikan beasiswa bagi keluarga berpenghasilan rendah. Bahkan pemerintah federal menyiapkan dana tidak kurang 100 miliar dollar AS dalam setiap tahunnya untuk kebutuhan beasiswa. Bila di negara-negara sebagaimana disebut di atas alokasi biaya demikian yang begitu besar diditrusbusikan untuk kepentingan anak bangsa maka dalam konteks kebangsaan pantaslah kalau mereka memiliki loyalitas yang tinggi kepada negaranya. Sedangkan di Indonesia, para orang tua kurang merasakan jasa pemerintah maka berlakulah paradigma rate of return. Investasi yang ditanam oleh orang tua selama sekolah, harus segera kembali.9

C. Manajemen Mutu Sekolah Bertaraf Internasional

Tolok ukur dari keberhasilan dari sekolah sangat ditentukan oleh kualitas manajemen/tatakelola yang dipraktikkan pada sekolah yang bersangkutan. Pengelola SBI/RSBI harus kerja keras untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang sudah terlanjur diberi label internasional tersebut menjadi ikon pendidikan di Indonesia. Jika SBI telah menetapkan 8 standar plus mengadopsi kurikulum dari sekolah di negara maju, maka kosnekuensi logisnya adalah sekolah tersebut harus bekerja keras untuk mencapai standar tersebut. Akan tetapi, mampukah sekolah bertaraf internasional menerapkannya? Mengingat beban yang harus ditanggung oleh sekolah tersebut begitu berat. Misalnya saja, di beberapa daerah, tingkat kelulusan peserta didik SBI/RSBI dalam ujian nasional (UN) justru mengalami penurunan dibanding dengan

9 Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, (Jakarta: PT. Kompas, 2008), hlm. 321

Mengatasi kesenjangan sebagaimana di atas, perlu kiranya ditetapkan langkah-langkah strategis dengan membuat perencanaan dengan melakukan analisis meliputi bagaimana kondisi sekolah saat ini, kondisi sekolah yang diharapkan (expected condition), strategi dan tahapan-tahapan pencapaianya. Dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang dikehendaki, akan dapat diketahui kesenjangan yang ada, baik dari segi fasilitas, guru, manajemen sekolah, dan mutu lulusannya. Selanjutnya sekolah harus mengembangkan sumber daya pendidikan yang dimiliki, terutama dalam aspek sumberdaya manusia. Oleh sebab itu, sumber daya manusia dituntut profesional dan tangguh. Hal itu bisa ditunjukkan oleh penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki wawasan global.

Sebagai satuan pendidikan yang memiliki label internasional, pengelola SBI berupaya meningkatkan diri secara bertahap dan berkelanjutan, terutama dalam bidang manajemen dan kestrukturalan komunikasi dalam bahasa asing. Begitu juga pengembangan guru-guru harus dilakukan secara bertahap sehingga karakteristik sekolah bertaraf internasional tercermin dari profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dalam berbagai hal yang meliputi: kemampuan bekerjasama secara kooperatif dan pemberdayaan bersama serta didukung oleh kepemimpinan yang transformasi dan visioner. Selain itu, sekolah bertaraf internasional juga harus mampu memenuhi tuntutan global yang mengharuskan penguatan tata kelola dicirikan antara lain dengan adanya transparansi, akuntabilitas, profesional, demokratis, dan good governance. Pencapaian ke arah itu, harus didukung oleh adanya intensifikasi sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian juga dinilai hal pengembangan kurikulum, harus mampu mengadopsi maupun adaptasi terhadap perkembangan kurikulum dari negara-negara maju. Ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dan tidak
bertentangan dengan ideologi Pancasila, nilai-nilai agama, dan kebudayaan bangsa Indonesia.


Menyikapi banyaknya suara kritik yang dilontarkan oleh berbagai kalangan terhadap program sekolah bertaraf internasional, tidak seharusnya serta-merta menjadikan arah pendidikan harus berbelok arah. Untuk itu, bersikap kritis terhadap persoalan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal penting yang antara lain sebagai berikut; pertama, melihat Indonesia sebagai negara kesatuan yang begitu luas, pendidikan seharusnya mampu menjangkau ke semua wilayah dengan segala aneka keragaman budayanya. Karena setiap warga Indonesia di manapun tempatnya, memiliki hak sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Pendidikan dalam hal ini, secara institusi maupun substansi tidak harus membedakan suku, bangsa, ras, bahasa, serta agama dan adat istiadat warga Indonesia. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang bermutu.

Kedua, pendidikan sebagai lembaga, di samping memiliki fungsi edukasi juga memiliki fungsi dalam melahirkan manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme, yaitu manusia yang cinta kepada tanah air dan siap berkorban untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, munculnya sekolah bertaraf internasional di berbagai daerah yang telah banyak menyedot dana rakyat, seharusnya tidak memicu kesenjangan, apalagi kecemburuan yang kemudian menimbulkan disintegrasi bangsa.

tidak boleh tereduksi oleh program SBI. Naasnya kurikulum yang diadopsi atau diadaptasi berasal dari negara-negara maju yang memiliki kultur dan budaya berbeda dengan bangsa Indonesia.

D. Simpulan
Dari berbagai telaah dan analisis munculnya persoalan-persoalan pendidikan di atas, ditengarai ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan internasional di Indonesia, yaitu: pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih banyak menggunakan pendekatan education function atau input-output tanpa analisis yang konsekuen. Artinya, jika semua kebutuhan pendidikan di-supply maka out-put akan seperti yang diharapkan. Pendekatan ini menganggap jika input seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan kelengkapan sarana-prasarana telah dipenuhi dengan sendirinya mutu pendidikan (out-put) secara otomatis akan terjadi. Sayangnya pendekatan ini menegasikan proses pendidikan yang merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan.


Daftar Pustaka
Persada.